

Oleh Ashadi Siregar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada*Kronik¹*

Genealogi Universitas Gadjah Mada dapat dirunut ke tahun 1946 saat berbagai kepresidencian dan kabinet RI di hijrah dari Jakarta ke Yogyakarta akibat ancaman pemerintah kolonial Belanda yang ikut bersama dengan tentara Sekutu yang dimotori Inggris. Sehingga Bukana Republik Indonesia berada di kota Yogyakarta hingga akhir tahun 1949. Dengan keberadaan pejabat-pejabat negara berpendidikan tinggi di kota ini, sementara disaksikan mendesaknya pengadaaan pejabat negara, maka diadakan berbagai pendafikan berupa kursus-kursus dan rangkain ceramah. Di antara penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut adalah Akademi Ilmu Politik dengan para penjurunya terdiri dari para pejabat negara ada di Yogyakarta, yang bertitel sarjana berbagai bidang lulusan fakultas-fakultas dari negeri Belanda maupun yang ada di Jakarta (Batavia) pada masa penjajahan Belanda.

Tujuan diadakannya Akademi Ilmu Politik ini adalah menyiapkan sarjana untuk mengisi jabatan-jabatan negara dalam bidang pemerintahan dalam negeri, diplomasi luar negeri, dan pemerintahan. Bilah-skali-bakal dari pendidikan tinggi bidang pemerintahan, hubungan internasional, dan publisistik di Universitas Gadjah Mada.

Bersamaan itu para sarjana yang berakap non-kooperatif dengan kolonial Belanda yang masuk kerahib di Indonesia, juga menyelenggarakan pendidikan tinggi, seperti dokter-dokter lulusan jaman Belanda mendirikan perguruan tinggi kedokteran, sarjana teknik mendirikan sekolah teknik, dan lainnya. Pada umumnya, setiap bidang pendidikan tinggi itu terkait dengan departemen-kementerian tertentu, seperti persiapan tenaga beridik untuk Kementerian Penerangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kemakmuran, dan seterusnya.

Perubahan pertama kerahib institusionalisasi pendidikan tinggi adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah no 21 tahun 1949 tentang "Peraturan Sementara tentang Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi Universitas". Pada saat itu, pendidikan tinggi yang sudah ada dengan penamaan bermacam-macam seperti Akademi, Balai Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi yaitu:

1. Kedokteran
2. Teknik
3. Sastra dan Filsafat
4. Pertanian
5. Kedokteran Hewan
6. Hukum

Keruan pendidikan tinggi itu yang tadinya tersebar di berbagai tempat, digabungkan menjadi fakulti-fakulti di dalam Universitas Negeri Gadjah Mada (UNGM). Dengan demikian, warisan penting sebelum pemerintahan RI kembali ke Jakarta, adalah di Yogyakarta diwujudkan berfirtinya universitas pemerintah pertama di Indonesia, yaitu 19 Desember 1949.

Adapun di dalam Fakultas Hukum terdapat:

¹ Data dirujuk dan Masburi Masbahi, ed., (1980) *Buku Peringatan 15 Abad Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada*. Pustaka Pustaka Perguruan Seprenep, Abad Fakultas Sosial dan Politik UGM, Yogyakarta, dan M. Dawam Rahandjo dkk., ed., (1999) *50 Tahun UGM - Di Sepuluh Dimensi Politik Bangsa*. Pustaka LP3ES, Jakarta 1999.

1. Akademi Ilmu Politik
2. Akademi Keahlian Hukum, Keahlian Ekonomi dan Notariat
3. Akademi Pendidikan Guru Bagian Tarung, Ekonomi dan Sosiologi

Pada tahun 1950 ditetapkan Peraturan Pemerintah (no 30 tahun 1950) tentang Penghapusan Bentuk Akademi dalam Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Untuk itu akademi-akademi yang ada pada Fakultas Hukum (sebutan berakhiran "ia" diubah menjadi "ie"), dilebur dan dibentuk baru sebagai Fakultas Hukum, Sosial dan Politik (HESP) terdiri atas:

1. Bagian Hukum
2. Bagian Sosial dan Politik.

Bagian Sosial dan Politik berasal dari Akademi Ilmu Politik, terdiri atas:

1. Jurusan Pemerintahan
2. Jurusan Hubungan Internasional
3. Jurusan Publisitas.

Pada tahun 1951, Bagian Sosial dan Politik pada Fakultas Hukum, Sosial dan Politik, mengalami perubahan pada jurusan publisitas, sehingga selanjutnya terdiri atas:

1. Jurusan Pemerintahan
2. Jurusan Hubungan Internasional
3. Jurusan Kemasyarakatan dan Publisitas.

Tahun 1952, Fakultas Hukum, Sosial dan Politik, ditambah dengan bagian Ekonomi, sehingga menjadi Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik (HESP) yang terdiri atas:

1. Bagian Hukum
2. Bagian Ekonomi
3. Bagian Sosial dan Politik.

Bagian Sosial dan Politik tidak ada perubahan, yaitu:

1. Jurusan Pemerintahan
2. Jurusan Hubungan Internasional
3. Jurusan Kemasyarakatan dan Publisitas.

Pada 19 September 1955, bagian bagian pada Fakultas HESP mendapat peningkatan status sebagai Fakultas yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Sosial dan Politik. Dengan demikian tanggal tersebut sebagai hari lahir Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (setelah fakultas dan universitas menggunakan fakultas dan universitas sejak 1954, sebutan Universitas Negeri Gadjah Mada UNGM diubah menjadi Universitas Gadjah Mada UGM).

Tahun 1957 Fakultas Sosial dan Politik dikembangkan, jurusan Kemasyarakatan dan Publisitas dihapus, kemudian dibentuk jurusan Ilmu Publisistik, Sosiologi, dan Ilmu Sosiatri, sehingga fakultas terdiri dari 5 jurusan, yaitu:

1. Ilmu Usaha Negara (mengganti Pemerintahan)
2. Ilmu Hubungan Internasional
3. Ilmu Publisistik (mengganti nama publisitas)
4. Sosiologi
5. Ilmu Sosiatri

Pada tahun 1964, Jurusan Pemerintahan dihidupkan kembali, dan Ilmu Usaha Negara diganti Ilmu Administrasi Negara. Sejak itu Fakultas Sosial dan Politik terdiri dari 6 jurusan, yaitu:

1. Ilmu Administrasi Negara (mengganti nama Ilmu Usaha Negara)
2. Ilmu Hubungan Internasional
3. Ilmu Publisistik
4. Sosiologi
5. Ilmu Sosiatri
6. Ilmu Pemerintahan

Kebeknaan Universitas Gadjah Mada dan khususnya Fakultas Sosial dan Politik perlu dilihat dari semangat jaman yang melingkupinya. Babwa pengajaran berlangsung dalam interaksi yang intens dan egaliter dari jaman revolusi, antara mahasiswa yang umumnya bekas mahasiswa dari sekolah Belanda yang menjadi pejuang (Corps Mahasiswa CM), atau bekas Tentara Pelajar (TP) yang berhasil menyelesaikan SMA, sambil berjuang, dengan pengajar-pengajar yang terdiri para pejabat negara RI yang sarjana lulusan sekolah Belanda tetapi beresap non-kooperatif dengan Belanda. Kemudian pemerintahan kembali berpusat di Jakarta setelah tahun 1950, untuk waktu yang lama sejumlah pejabat negara itu masih datang mengajar ke UGM. Bung Hatta saat itu Wakil Presiden, secara berkala tetap mengajar ulang-alk Jakarta - Yogyakarta sampai kemudian berbertiri diri bersama dengan pengundukan diri dari jabatan ke negeranya tahun 1957. Para lulusan didikan dari pengajar-pengajar itulah kemudian melanjutkan sebagai pengajar di UGM. Hampir semua pengajar yang menyebar di berbagai jurusan dan fakultas di UGM dari tahun 50-an itu adalah bekas mahasiswa pejuang atau TP yang mendapat pendidikan langsung dari Bung Karso, Bung Hatta, dan lainnya.

Dari awal berdiri Fakultas Sosial dan Politik (bersama Fakultas Hukum), pengajaran diselenggarakan di Pageroran dan Sihaneggid, yaitu bangunan pascuan umum Klaton Yogyakarta yang dipinjamkan oleh Sultan Hamengkabuwono IX. Baru pada tahun 1973 Fakultas Sosial dan Politik pindah menempati gedung berada di satu kompleks yang dibangun UGM, yaitu di kawasan Sekip dan Bulksamer.

Pada tahun 1982, dengan Keputusan Presiden no 107, nama Ilmu Publisistik dan Komunikasi Massa, diseragamkan menjadi Ilmu Komunikasi. Dengan begitu jurusan-jurusan pada Fakultas Sosial dan Politik UGM sejak itu adalah:

1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Hubungan Internasional
3. Ilmu Komunikasi (mengganti nama publisistik)
4. Sosiologi
5. Ilmu Sosiatri
6. Ilmu Pemerintahan

Data kronik dapat menunjukkan perubahan-perubahan nomenklatur dari ilmu-ilmu yang diajarkan dan dikembangkan di Fakultas Sosial dan Politik. Tetapi apakah penamaan itu akan memperjelas perbedaan kategori, dari masing-masing ilmu, tentunya masalah lain. Apakah perlu membedakan *focus of interest*, apakah cukup dipertegas melalui perbedaan *focus of interest* apa, merupakan tantangan dalam mengisi bangunan epistemologis dari masing-masing pengembangan ilmu.

Saat ini, maza dari pendidikan Fakultas (Ilmu) Sosial dan (Ilmu) Politik secara formal adalah pada lulusan yang diberi label Sarjana Sosial (SSo) dan Sarjana Ilmu Politik (SIP). Pelebaran ini dapat menguraikan perdebatan tentang nomenklatur dari ilmu-ilmu yang berada pada salah kategori induk: Sosial (interaksi sosial dalam konteks masyarakat (*society*)) atau Politik (interaksi sosial dalam konteks negara (*state*)). Pelebaran Sarjana Sosial untuk jurusan-jurusan Sosiologi dan Sosiatri atau Sarjana Ilmu Politik untuk lulusan jurusan-jurusan Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Hubungan Internasional, dan Ilmu Pemerintahan, dapat dipandang menyelesaikan perdebatan di antara domain. Tetapi akan menyisakan pertanyaan untuk label Sarjana Ilmu Politik bagi lulusan jurusan Ilmu Komunikasi. Apa *rationale* memasukkan Ilmu Komunikasi ke dalam domain Ilmu Politik, sementara *focus* bagi proses *mediation* (komunikasi) berfokus pada *social* dan *state*? Pembelajaran Ilmu

Komunikasi tidak dapat dipaksa untuk hanya menempatkan *focus of interestnya* pada *locus* yang berkonteks *state*.

Sebaliknya, pelabelan ini tidak ada maknanya atau tidak perlu diperseolkan, jika malar dari kegiatan pendidikan tinggi dengan basis keilmuan dilabel pada karakter subotonomi, yaitu kontribusi dalam pengembangan epistemologi yang ditunjukkan dengan domain teoritis yang diakui dan digunakan oleh komunitas keilmuannya, dan sarana metodologi yang dapat dipisahkan oleh pengembangan ilmu. Kerennya tantangan bagi lulusan dari masing-masing jurusan bukan dari label ditetapkan oleh otoritas negara, tetapi dengan kesadaran epistemologi atas ilmu yang dikembangkan.

Pendidikan Ilmu Komunikasi di Universitas Gadjah Mada

Kronik

1964: Keabhan perancangan publikitas jabatan negara, Akademi Ilmu Politik
 1950: Jurusan Publisistis, Bagian Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, Sosial dan Politik (HSP)
 1952: Jurusan Kemasyarakatan dan Publisistis, Bagian Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik (HESP)
 1955: Jurusan Kemasyarakatan dan Publisistis, Fakultas Sosial dan Politik (Sospol)
 1957: Jurusan Ilmu Publisistik, Fakultas Sosial dan Politik (Sospol)
 1982: Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (kipol)

Orientasi pendidikan Ilmu Komunikasi

Awal pendidikan Ilmu Komunikasi di Indonesia dapat ditelusuri dari Akademi Ilmu Politik yang menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk jabatan negara dalam bidang penerangan (Publicistia). Orientasi pengajaran dalam jabatan negara ini berlanjut dengan dibentuknya jurusan Publistis dan perubahan nama sebagai Ilmu Publisistik.

Dari namanya: publisistis (*publistieren*, Belanda = mengumumkan) dan publisistik (*publistisch*, Jerman = penyusunan kepada publik), maka pengajaran pada dasarnya bersifat pragmatis yaitu memberikan pengetahuan tentang kegiatan publikasi.

Pada saat bernama publisistis/publisistik, paradigma dalam pendidikan tinggi adalah menempatkan pengetahuan yang mendukung kegiatan publikasi dalam kehidupan *polity* yaitu untuk mempengaruhi publik agar sesuai dengan tujuan pemerintah negara. Pada tahap ini keberadaan pendidikan tinggi adalah mempersiapkan pejabat untuk menempati posisi pada instansi pemerintah. Untuk itu fokus pendidikan adalah di satu sisi propoganda dan keterampilan publisitas lainnya, dan *public opinion* dan pengetahuan sosial dan politik yang mendukungnya. Sayangnya tidak diketahui apakah pada masa itu sarjana jurusan Publistis sudah memfoto diri, karena sama sekali tidak ada arsip yang dapat ditelusuri mengenai gambaran pengajaran dan orientasi pengetahuan tentang publisistis di masa itu.

Dengan sebutan Ilmu Publisistik, sesuai dengan tradisi Jerman, *publistisch* sebagai pengetahuan tentang penyusunan kepada publik melalui pers, mulai diperkenalkan jurnalistik sebagai kegiatan publisitas bersifat obyektif, dan dengan Ilmu Publisistik dikembangkan epistemologi yang berfokus pada motivasi pers dan berfokus pada fungsi pers dalam kehidupan publik (masyarakat dan negara). Dengan begitu persipatif sosiologis dan politik mendapat tempat yang sama.

² Singkat 'sejarah' yang dapat ditelusuri antara lain adalah: Jakob Ortman untuk buku dari jurusan Ilmu Publistis tahun 1962. Dari sisi ini dan singkapan lainnya diketahui bahwa perhatian diarahkan kepada media pers-jurnalistik dalam konteks negara.

Sejarah Ilmu Publisistik yang masuk ke Indonesia perlu dilihat dari akarinya, bermula dari kajian sosial (termasuk sejarah, sosiologi dan politik) terhadap media pers sebelum Perang Dunia II. Pendidikan dan kajian semacam ini terjadi saat berkuasanya pemerintahan Nazi, sebab kemudian penggunaan publikasi dan seluruh media massa untuk instrumene propaganda oleh rezim Nazi Hitler. Sejumlah ilmuan yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintahan Hitler, hijrah dari Jerman. Runtuhnya rezim Hitler memulihkan kembali kajian publisistik dengan orientasi sebelumnya, yaitu sebagai kajian keilmuan yang bersifat obyektif. Dari sini dapat dipahami penamaan jurusan "Kemasyarakatan dan Publikasi" (1952 - 1957), yaitu mulai masuknya pemikiran dari Jerman yang menggunakan pengetahuan kemasyarakatan sebagai konteks dalam mempelajari publikasi. Sampai pada saat ini, para dosen yang mengabdikan diri sebagai Ilmu Publisistik untuk jurusan di Universitas Gadjah Mada. Di sini sudah mulai dikembangkan epistemologi, tentang fenomena publikasi dalam kehidupan publik. Pengertian epistemologi disini adalah, teori dan metode tentang fenomena publikasi, yang didasarkan dari kepentingan pragmatis. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang membawa implikasi pada keragaman kelas perhatian bagi Ilmu Komunikasi. Jika sebelumnya perhatian pada intansi pers, dengan pertumbuhan radio dan film maka kelas perhatian berubahlah luas. Selajunya membawa konsep-konsep teori yang digunakan, sebab tidak semua media berkonteks pada polry³.

Tantangan yang dihadapi adalah keberadaan media dan konteksnya, pertama: perhatian terhadap media dengan basis: jurnalistik (pers, radio, film televisive dan komunikasi) diperluas, yaitu dengan memberi perhatian yang sama untuk media lainnya dengan basis non-jurnalistik, seperti media sosial, media film cerita bioskop (*theatrical film*), televisi, dan lainnya. Kedua: konteks bukan hanya negara (*state*), sebab semakin menjajanya peras pasar (*market capitalism*) industrial sebagai konteks keberadaan media, membawa konsekuensi dalam pendidikan komunikasi. Setelah tahun 70-an di Indonesia, kelas media dalam konteks pasar/industrial mulai dalam pendidikan/publikistik berguna pengajaran dan kajian komunikasi komersial. Tekanan dari pasar atau dunia industri menyebabkan pendidikan tinggi Ilmu Publisistik mengkapiti diri dengan pengajaran dengan pengetahuan komunikasi komersial dalam kerangka. Jika sebelumnya pengetahuan Public Relations misalnya ditepikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kini dikembangkan dalam konteks bisnis komersial, sekaligus juga dengan pengetahuan perkembangan bisnis. Dengan begitu cakupan sebatan publisistik terentang soal milyarnya semakin tidak memadai. Sebutan Ilmu Komunikasi semakin intensif digunakan, sampai akhirnya dengan keputusan Presiden RI no 107 tahun 1982, seluruh pendidikan tinggi yang menggunakan nama Ilmu Publisistik ataupun Komunikasi Massa diseragamkan dengan sebutan Ilmu Komunikasi.

Perseaban yang menggerakkan penobatan untuk sebatan ini pada dasarnya hanya dalam perhatian konteks, apakah negara (publisistik) atau pasar (komunikasi) masa komersial, tidak menyertah paradigms. Untuk kedua konteks itu, paradigms yang digunakan masih tetap berdiri dalam aliran (*school*) yang disebut sebagai transmisi pesan (*transmission of message*) dengan orientasi pragmatis, yaitu pemanfaatan media sebagai instrumen untuk mempengaruhi publik untuk kepentingan komunikator. Dalam paradigms ini pendekatan tetap bersifat positif, atau *logico-empiricism*, dan di dalamnya berkembang teori-teori pragmatis seperti teori media dan efek, *multi-step*, inovasi, jaringan, dan lainnya yang berdiri dalam konteks negara dan pasar. Perubahannya dalam paradigms transmisi pesan hanya dari bersifat linier ke pola *shuring* terhadap pesan, sedang di dalamnya perkembangan berakut dengan jurnalisme untuk media massa, dan komunikasi personal untuk politik dan bisnis industrial. Dengan begitu pendidikan dalam aliran ini adalah pengetahuan tentang media yang terdiri atas 3 kelas yaitu media sosial, media massa konvensional dan media interaktif (*cyber*) yang ditempatkan dalam 3 fokus yaitu jurnalisme, perwasi politik, dan perwasi bisnis. Untuk itu semua disertai dengan pengetahuan pendukung seperti psikologi komunikasi, komunikasi politik, dan sosiologi komunikasi.

³ Lihat Astrid S. Sarasua, (1974). *Komunikasi dalam Teori dan Praktek*, jilid I. Penerbit Binacipta, Bandung, h.viii.

Orientasi dari aliran Ilmu Komunikasi bersifat pragmatis di Indonesia dapat disebut tidak beranak sampai akhir '90an, yaitu penggunaan pengetahuan komunikasi sebagai instrumen dalam sistem negara. Perkembangan signifikan terjadi dengan perubahan konstelasi politik dari Orde Lama ke Orde Baru. Rezim Orde Baru mengadakan pembangunan melalui industrialisasi terutama dengan menggunakan modal asing dan Multi National Corporation (MNC). Koneksitasnya, masuknya modal ini sekaligus membawa perangkat instrumen bisnis berupa komunikasi komersial. Proses industrialisasi berlangsung dalam media dengan perkembangan industri periklanan di satu sisi dan media jurnalistik berorientasi industrial.

Indonesia sebagai negara berkembang tereset dengan suasana konflik global dari masa perang dingin. Kecurigaan pemerintahan Barat terutama Amerika Serikat bahwa negara-negara miskin yang didominasi oleh petani ini dapat tereset ke blok Timur, lebih menyebabkan ada upaya besar-besaran tahun 60-an sampai '70an untuk mengubah secara mikro (personal) dan makro (individu) masyarakat negara agraris ke format masyarakat industrial model Barat. Di Indonesia rezim Orde Baru sebagai perantara dari kekuatan modal Barat, mengadakan percepatan aksi pembangunan, modernisasi, atau industrialisasi. Untuk itu kajian-kajian dilakukan sebagai upaya untuk menjadikan komunikasi sebagai perangkat rekayasa sosial dalam pembangunan yang berorientasi ke industri.

Sering itu berkembang pengetahuan komunikasi dari Barat sebagai instrumen pembangunan, yaitu komunikasi pembangunan (*development communication/DC*) dan komunikasi pendukung pembangunan (*development support communication/DSC*), yang dirajakan melalui perbedaan perbedaan orientasi dan teknik komunikasi dalam rekayasa informasi untuk pembangunan dengan orientasi makro dan mikro. Schramm, Rogers, dan lainnya yang dikenal sebagai tokoh komunikasi banyak mendapat dana dari pemerintah Amerika Serikat untuk pengembangan pengetahuan komunikasi yang dapat digunakan untuk mengubah masyarakat dalam model Barat.¹

Di Barat sejak tahun '80an merebak ketidak-puasan dan pandangan kritis terhadap aliran pragmatis dalam Ilmu Komunikasi. Ketidak-puasan ini punya akar yang kuat di Jerman sejak berakhirnya PD II yang disertai dengan berdirinya pusat kajian komunikasi di Universitas Frankfurt, kemudian di Inggris berpusat di Universitas Birmingham. Secara sporadis, di Amerika Serikat berkembang kajian kajian kritis dengan perspektif ideologi dan kultural.

Dari sini pendidikan Ilmu Komunikasi mengembangkan epistemologi yang sama sekali berbeda dengan aliran transmisi pesan dengan orientasi pragmatis, yaitu melihat komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna (*production and exchange meaning*). Di dalam aliran ini berkembang metode yang bertumpu pada, *ekonomis* (bermasyarakat, dengan teori-teori kritik ideologi, komodifikasi media) (ekonomi politik), konstruksi (makna publik (kultural), dan lainnya, dengan fokus media berkontak negara, pasar, atau masyarakat warga (*civil society*), globalitas atau lokalitas, dan lainnya.

Masuknya aliran ini tidak menimbulkan guncangan sebagaimana terjadi saat berkembangnya pendidikan dan kajian Ilmu Komunikasi dengan fokus media dalam konteks pasar pada tahun '70an yang menyebabkan Presiden RI sampai mengemukakan keprihatinan untuk mengorganisasi sebuah untuk pendidikan Ilmu Komunikasi. Dominasi aliran "transmisi pesan" dalam pendidikan Ilmu Komunikasi mulai tergeser berlangsung sesuai dengan perkembangan teknologi dan proses industrialisasi media. Tetapi pada sisi lain, sejak tahun '90an semenarik banyak hasil-hasil kajian yang menggunakan aliran ini di jurusan Ilmu Komunikasi UGM.

Perbedaan kedua aliran dapat dilihat dari contoh praktik jurnalistik untuk tujuan pragmatis yaitu yang berbasis pada *newsworthiness* dan aspek teknis lainnya, yang menjadi menjadi dasar

¹ Lihat Daniel Dinkler (1991) *The State, the Rise of Capital and the Fall of Political Journalism, Political Economy of Indonesian News Industry*, Cornell University. *Ilmu Komunikasi* (PMD)

² Lihat Christopher Simons (1994) *Science of Creation: Communication Research & Psychological Welfare 1945-1980*, Oxford University Press, Oxford

³ Lihat Robert W. Mc Chesney (2007) *Communication Revolution: Critical Junctures and the Future of Media*, The New Press, New York

dalam dunia media yang bersifat industrial. Dalam aliran ini, pengetahuan (praktis dan analitis) pragmatis diperlukan agar peserta didik tidak canggung untuk memasuki bidang media dalam konteks negara, pasar, dan masyarakat. Kebehasilan pendidikan Ilmu Komunikasi dilihat dari parameter kapasitas adaptif peserta didik kepada media, dan daya serap media terhadap luhuan.

Tetapi pada sisi lain, jurnalisisme perlu ditempatkan sebagai subjek komunikasi yang mempromosikan makna, dan dari sisi kebebasan media pers/jurnalisisme di ruang publik dilihat dalam perspektif kultural. Dengan demikian tantangan pendidikan Ilmu Komunikasi adalah memberikan pengetahuan dengan epistemologi yang jelas dari lokus media bagi dimunya. Sementara dalam aliran ini, pengetahuan tentang lokus media dalam perspektif kultural akan mengarahkan peserta didik sebagai analis media dengan berbagai teori dan pendekatan kritis. Dengan demikian pendidikan Ilmu Komunikasi memberikan kontribusi dalam rambun untuk situasi dengan analisis kritis atas makna kultural dari media dalam konteks negara, pasar dan masyarakat.

Sebagai penutup, bahwa orientasi pendidikan pada dasarnya terbentuk dari 2 sisi: pertama, akibat tekanan imperatif kekuasaan dari luar domain pendidikan, dan kedua, akibat perubahan media komunikasi dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama bisa disebut sebagai politik praktik/bertindakan otoritas negara yang menetapkan orientasi institusional guna mendapatkan keharuan yang sesuai dengan kebutuhan pemakai tenaga kerja dalam lingkup pragmatis ekonomi dan politik. Sedangkan yang kedua, menyangkut perkembangan epistemologi, melalui respon dengan pilihan-pilihan konsepsi berfokus pada fenomena mediasi dalam kehidupan manusia, mulai media komunikasi konvensional hingga media komunikasi berbasis komputer (*computer-mediated communication*).

Urutan singkat ini dimaksudkan untuk melihat perubahan institusional dari sisi pertama, untuk itu metamorfosis Ilmu Publisistik/Komunikasi dapat dilihat dirangkum sebagai berikut:

pertama: pengetahuan praktis publisistik/publisitas untuk kegiatan pemerintahan (1946 - 1952);
kedua: pengetahuan komunikasi untuk kegiatan publisistik dalam konteks negara (1952 - 1957);
ketiga: epistemologi publisistik untuk media massa dalam konteks negara (1957 - akhir 60an);
keempat: epistemologi komunikasi untuk media dalam konteks negara dan pasar (70 - 90an, tahun 1982 sebutan Ilmu Komunikasi digunakan untuk pendidikan tinggi di Indonesia).